

dinas komunikasi dan informatika
kabupaten trenggalek

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023





**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 112);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. sistematika.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang memuat memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,

Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Juli 2022
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA

NIP. 19680524199703 1 001

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD (Perangkat Daerah) sesuai tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek tahun 2023 memuat program/ kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan berdasarkan pada tema RKPD Tahun 2023 **“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”**.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang- Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 – 2032;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 24 September 2021, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 39;
33. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2022. Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 18.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang . Renja OPD juga digunakan

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2023 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan antara lain:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023; dan
- b. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selama tahun 2022.

2.1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Untuk memantapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah yaitu Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 6.250.000 realisasi Rp. 6.250.000 atau 100% dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 15.104.121.677 realisasi Rp. 14.046.360.031 atau 93% terdiri dari 5 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan sebagaimana tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2021

1	2	3		4		5		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100%	15.104.121.677	97,29	14.046.360.031	97,29	93%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi	100	%	5.637.981.107	186,37	5.608.021.138	186,37%	99,47%
	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100	%	306.067.130	813	275.899.856	-	90,14%
	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	13.397.000	100,00	12.799.000	100,00%	95,54%
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	9	Dokumen	13.397.000	9	12.799.000	100,00%	95,54%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	Dokumen	13.397.000	9	12.799.000	100,00%	95,54%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	4.725.314.677	146,96	4.443.398.431	146,96%	94,03%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100	%	4.637.586.677	93,92	4.355.774.431	93,92%	93,92%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang di susun	2	dokumen	87.728.000	2	87.624.000	100,00%	99,88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100	%	361.736.430	257,31	339.969.700	257,31%	93,98%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2000	buah	183.996.430	2.116	179.783.050	105,81%	97,71%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	1600	unit	48.040.000	2.031	47.936.000	126,94%	99,78%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	400	buah	31.000.000	1.330	30.091.750	332,50%	97,07%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	25	kali	98.700.000	116	82.158.900	464,00%	83,24%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100	%	112.235.000	117,1	104.972.091	117,13%	93,53%
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	15	Unit	10.000.000	15	9.876.000	100,00%	98,76%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	11	Unit	102.235.000	14	95.096.091	127,27%	93,02%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100	%	550.930.000	154,84	535.954.151	154,84%	97,28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi	39.531	kwh	124.550.000	38.390	111.690.648	97,11%	89,68%
	Jumlah kawat/faksimili/internet/TV berlangganan kantor yang dicukupi	200	Mbps		200	0	100,00%	

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
		3		4		5		
1	2	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi	2.000.000		1.541.276	0	77,06%		
	Jumlah koran yang dibayarkan	376	eksemplar	376	0	100,00%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan yang menerima honorarium dan Jaminan Asuransi Kesehatan	12	Dokumen	426.380.000	12	424.263.503	100,00%	99,50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	193.832.130	90,84	170.927.765	90,84%	88,18%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang di Fasilitas Jasa Pemeliharaanya	24	Unit	33.430.000	16	24.957.182	66,67%	74,66%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3	Buah	550.000	3	540.000	100,00%	98,18%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	80	Unit	73.824.130	76	62.773.278	95,00%	85,03%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit (gedung induk, tempat parkir, taman, RKPD)	86.028.000	6	82.657.305	150,00%	96,08%
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, Mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100	%	2.263.084.270	94,10	2.091.652.428	94,10%	92,42%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Update Informasi Publik Kebijakan, Program dan Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	2.263.084.270	94,10	2.091.652.428	94,10%	92,42%
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Penyajian Konten di Media IKP Pemerintah Daerah	22	Konten	130.000.012	14	101.364.000	63,64%	77,97%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Media Massa	2.014,00	Advetorial	955.935.000	2.385	929.815.194	118,42%	97,27%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Tata Kelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik	6	Kali	168.000.000	7	151.417.900	116,67%	90,13%
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Sebagai Jejaring Desiminasi Informasi yang Dikoordinasikan	5	Kali	45.000.000	2	40.773.250	40,00%	90,61%
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung IKP yang diadakan	45	Jenis	964.149.258	53	868.282.084	117,78%	90,06%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100	%	5.246.589.730	71,50	5.244.051.009	71,50%	99,95%
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	%	465.002.440	83,33	388.993.946	83,33%	

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		
		3		4		5		
1	2	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah	100	%	5.246.589.730	116,67	4.880.206.063	116,67%	92,92%
	Persentase Penyediaan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah	100	%	-	1,33	0	1,33%	
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12	kali	72.600.000	12	63.526.148	100,00%	80,57%
	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dilaksanakan	12	Kali		16	0	133%	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diadakan	20	paket	5.173.989.730	18	4.816.679.915	90,00%	93,09%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	465.002.440	83,33	397.663.946	83,33%	85,52%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi SPBE yang dilaksanakan	1	indeks	215.002.440	8	205.837.400	800,00%	95,74%
	Jumlah sosialisasi SPBE yang dilaksanakan	1	kali		4	0	400,00%	
	Jumlah kebijakan teknis yang disusun	2	dokumen		2	0	100,00%	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sosialisasi aplikasi yang dilaksanakan	2	kali	250.000.000	2	191.826.546	100,00%	76,73%
	Jumlah aplikasi yang dibangun	3	aplikasi		9	0	300,00%	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	%	877.000.000	100	775.567.215	100,00%	88,43%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4	dokumen	877.000.000	4	775.567.215	100,00%	88,43%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4	kali	127.000.000	2	100.404.250	50,00%	79,06%
	Jumlah Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4	dokumen		4	0	100,00%	
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	40	OPD	750.000.000	26	675.162.965	65,00%	90,02%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100	%	295.000.000	100	293.250.141	100,00%	99,41%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan kasus keamanan informasi dan persandian yang disusun	1	Dokumen	295.000.000	1	293.250.141	100,00%	99,41%

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
1	2	3		4		5			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kasus keamanan informasi dan persandian yang ditangani	40	OPD	295.000.000		3	293.250.141	7,50%	99,41%

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Diskominfo sampai dengan capaian kinerja triwulan II Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Diskominfo sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2

Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)				
		3		4		5		6		7				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.516.012.650									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	12.799.000	100	%	6.167.012.650	50	530.391.022		1.563.187.989	50	%	2.093.579.011	
	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	%	5.319.322.282	100	%		31,29			43,59	74,87	%	-	
	Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik	%	266.023.856	100	%		211				211	%	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	12.799.000	100	%	15.000.000	50	0	0	0	50	%	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9	Doku men	12.799.000	8	Dokumen (Renja 2023, Renja Perubahan 2022, RKA 2023, RKAP 2022, LKJIP 2022, LKPJ 2022, LPPD 2022, DPA/DPAP 2022)	15.000.000	4	0	0	0	4	Doku men	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	%	4.443.398.431	100	%	4.924.842.650	35,71	530.391.022	46,43	1.257.575.521	82,14	%	1.787.966.543	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan / di bayarkan	94% (26)	Doku men	4.355.774.431	14	Dokumen (Gaji ASN 12	4.824.842.650	3	530.391.022	6	1.219.905.521	9	Doku men	1.750.296.543

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)				
		3		4		5		6		7				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				bln, Gaji 13, THR)										
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disusun	2	Buah / Doku men	87.624.000	2	Buah / Dokumen	100.000.000	1	0	1	37.670.000	2	Buah / Doku men	37.670.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan		%	0	100	%	50.000.000	0	0	0	0	0	%	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat	0	ASN	0	20	ASN	50.000.000	0	0	0	0	0	ASN	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan		%	339.969.700	100	%	439.982.000	46,10		38,80	69.327.352	84,91	%	69.327.352
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2116	Buah	179.783.050	519	Buah	170.000.000	208		153	34.237.075	361	Buah	34.237.075
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan	2031	Buah	47.936.000	171	Buah	40.000.000	171		0	2.821.500	171	Buah	2.821.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	1330	Buah	30.091.750	500	Buah	29.982.000	180		87	10.194.600	267	Buah	10.194.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	116	Kali	82.158.900	12	Kali	200.000.000	1		13	22.074.177	14	Kali	22.074.177
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan		%	95.096.091	100	%	57.500.000	0		25,00	8.246.570	25	%	8.246.570
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		Buah		2	unit	7.500.000	0		0	0	0	Buah	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	14	Buah	95.096.091	10	Buah	50.000.000	0		3	8.246.570	3	Buah	8.246.570
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan		%	535.954.151	100	%	545.550.000	43,33	0	89,11	221.399.646	132,44	%	221.399.646
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Daya Listrik Kantor yang dicukupi	38.390	KWH	111.690.648	39.531	KWH	91.200.000	14.718	0	14.375	43.067.322	29093	KWH	43.067.322
	Jumlah kawat/faksimili/ internet /TV berlangganan kantor yang dicukupi	200	Mbps		0			0		0		0		-
	Jumlah Jasa Telepon Kantor yang dicukupi	2.000. 000	Rp		1.800.000	Rp		352.411		300.61 1		65302 2	Rp	-

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)				
		3		4		5		6		7				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Jumlah Koran yang dibayarkan	376	Eksem plar	93	Eksemplar	68		282		350	Eksem plar	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan dan Jaminan Asuransi Kesehatan	12	Jenis 20 TPK	424.263.503	1	Jenis 20 TPK	454.350.000	2		4	178.332.324	6	Jenis 20 TPK	178.332.324
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Pelihara		%	170.927.765	100	%	134.138.000	0	0	68,75	6.638.900	68,75	%	6.638.900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di fasilitasi Pemeliharaanya	16	Buah	24.957.182	2	Buah	30.000.000	0	0	5	4.683.900	5	Buah	4.683.900
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3	Buah	540.000	3	Buah	5.000.000	0	0	0	0	0	Buah	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	76	Buah	62.773.278	4	Buah	40.000.000	0	0	0	0	0	Buah	-
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung , Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6	Buah	82.657.305	4	Buah	59.138.000	0	0	1	1.955.000	1	Buah	1.955.000
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah		%	2.091.652.428	100	%	1.784.000.000	417,70		90,59	353.477.000	508,29	%	353.477.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Update Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		%	2.091.652.428	100	%	1.784.000.000	417,70	0	90,59	353.477.000	508,29	%	353.477.000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi yang diproduksi sebagai bahan desiminasi	14	kali	101.364.000	30	kali	75.000.000	168	0	101	14.968.000	269	kali	14.968.000
	Jumlah Peliputan penyelenggaraan program dan kinerja pemerintah daerah		kali		300	kali		0		0		0	kali	-
	Jumlah pembuatan konten audio visual program dan kinerja pemerintah daerah		konten (Swakel ola)		20	konten (Swakelola)		1		2		3	konten (Swakel ola)	-

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Jumlah pembuatan serta Pemasangan Banner Penyelenggaraan Program dan Kinerja pemerintah daerah	buah (Baliho)		15 buah (Baliho)		0		0		0 buah (Baliho)	-
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		kali		6 kali	853.000.000	0			213.822.000	0 kali	213.822.000
	Jumlah Update Desiminasi Informasi Melalui Media Massa	Adveto rial		2000 Advetorial		87	0	624		711 Adveto rial	-
	Jumlah Desiminasi Informasi Program dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Komunikasi Publik yang dilaksanakan	2.385 Kali	929.815.194	12 Kali		0		0		0 Kali	-
	Jumlah Perpanjangan Ijin LPPL RPKT	Doku men		2 Dokumen		0				0 Doku men	-
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di tindaklanjuti	Kali	151.417.900	8 Kali	185.000.000	66	0	71	3.347.000	137 Kali	3.347.000
	Jumlah Rapat monev	kali		2 kali		0		0		0 kali	-
	Jumlah Sosialisasi Bimtek Pengelola Pengaduan dan PPID yang dilaksanakan	7 Kali		2 Kali		0		1		1 Kali	-
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kegiatan Kemitraan yang berpotensi menjadi jejaring desiminasi informasi publik yang dikoordinasikan	2 7, 14, kali	40.773.250	1 7, 14, kali	71.000.000	0	0	2	2.050.000	2 7, 14, kali	2.050.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Komunikasi publik yang Mendapatkan Pembinaan	kali		5 kali	100.000.000	0	0	0	0	0 kali	-
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah barang/jasa pendukung IKP yang diadakan	53 jenis	868.282.084	52 jenis	500.000.000	0	0	2	119.290.000	2 jenis	119.290.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	4.875.176.063	100 %	4.565.000.000	0,50	0	6,95	495.122.111	7,45 %	495.122.111

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)			
		3		4		5		6		7			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	71,5	%	397.663.856	100	%	33,33		47,57		80,90	%	-
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Ketersediaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	116,6	%	4.875.176.063	100	%	0,00	0	2,30	470.095.611	2,30	%	470.095.611
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan Nama Domain dan Sub Domain	12	Cpanel	58.496.148	283	Cpanel	0	0	4	6.177.167	4	Cpanel	6.177.167
	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain yang dilaksanakan		Subdo main		283	Subdomain	0		9		9	Subdo main	-
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diadakan	18	%	4.816.679.915	100	%	1	0	7	463.918.444	8	%	463.918.444
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	83,33	%	397.663.856	100	%	33,33	0	47,57	25.026.500	80,90	%	25.026.500
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas SPBE yang Dilaksanakan	8	Kali	205.837.400	17	Kali	0	0	7	9.746.500	7	Kali	9.746.500
	Jumlah Kebijakan Teknis yang Disusun	2	Draf		1	Draf	1		1		2	Draf	-
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun	9	Aplika si, 3 Kali	191.826.456	3	Aplikasi , 3 Kali	2	0	1	15.280.000	3	Aplika si , 3 Kali	15.280.000
	Jumlah Sosialisasi Aplikasi yang dilaksanakan	2	Kali		3	Kali	0		1		1	Kali	-
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM ASN dan Masyarakat (Online	0	Orang	0	50	Orang	0	0	15	0	15	Orang	-

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran P- RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2022)	
		3		4		5		6		7	
1	2	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dan Offline) yang Dilaksanakan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	% 775.567.215	100	%	275.000.000	4,17	0	33,33	8.771.000	37,50 % 8.771.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yang disusun	4	% 775.567.215	100	%	275.000.000	4,17	0	33,33	8.771.000	37,5 % 8.771.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	2	OPD 100.404.250	40	OPD	125.000.000	5	0	0	3.949.000	5 OPD 3.949.000
	Jumlah Pengelolaan Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral yang dilaksanakan	4	Jenis	4	Jenis		0		2		2 Jenis -
Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengintegrasian dan Interoperabilitas Data yang dilaksanakan	26	Jenis Data Sektor al 675.162.965	2	Jenis Data Sektoral	150.000.000	0	0	1	4.822.000	1 Jenis Data Sektor al 4.822.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%	% 293.250.141	100	%	83.000.000	33,33	0	33,33	7.694.108	66,67 % 7.694.108
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di susun	1	% 293.250.141	100	%	83.000.000	33,33	0	33,33	7.694.108	66,67 % 7.694.108
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di tangani	3	Jenis , 40 OPD 293.250.141	3	Jenis , 40 OPD	83.000.000	1	0	1	7.694.108	2 Jenis , 40 OPD 7.694.108

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang pengelolaan komunikasi dan informasi serta urusan bidang statistik dan persandian memfokuskan pada beberapa sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya pelayanan sistem komunikasi dan informatika yaitu

- a. Indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) bahwa 40 OPD perangkat daerah telah terhubung dengan jaringan internet melalui pemasangan fiber optic pada perangkat daerah yang dapat dijangkau sejumlah 21 OPD meliputi Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas Pendidikan Pemuda dan OR, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Satpol PP dan Kebakaran, Dinsos P3A, Dinas Perinaker, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dispendukcapil, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perinaker, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bappedalitbang, Bakeuda, BKD, Kecamatan Trenggalek, Dinas Peternakan dan 13 kecamatan terhubungan jaringan internet dengan sistem sewa fiber optic dengan provider dikarenakan lokasi dan keadaan geografis yang belum memungkinkan terpasang. Sedangkan 6 OPD belum terhubung fiber optic meliputi Dinas KOMIDAG, Dinas PKPLH, Dinas PUPR, BPBD, Dinas Perhubungan dan Dinas PMD saat ini secara mandiri berlangganan jaringan internet namun Dinas Komunikasi dan Informatika secara bertahap akan memfasilitasi pemasangan Fiber Optik pada OPD yang belum terhubung jaringan internet. Disamping itu jumlah 301 domain dan sub domain pemerintahan Kabupaten Trenggalek difasilitasi penatalaksanaan dan pengawasannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Permintaan informasi dokumentasi yang dilayani bahwa selama tahun 2021 terdapat permintaan data ke PPID pembantu pada 2 OPD yaitu Kelurahan Kelutan dan Dinas PUPR dapat dicukupi keseluruhan sedangkan yang minta langsung ke PPID utama nihil. Permintaan informasi dan dokumentasi sangat rendah dikarenakan kurang paham arti pentingnya PPID dalam mendapatkan informasi yang akurat, umumnya mereka lebih cenderung mencari informasi melalui media sosial yang lebih mudah diakses, disamping itu perlu komitmen terhadap keberadaan PPID.

- 2. Meningkatkan Pelayanan Data Statistik**, dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan dan menggunakan data Statistik, pada tahun 2021 tersusunnya 4 dokumen statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi Dokumen Trenggalek Dalam Angka sebanyak 80 buku, Selayang Pandang Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 buku, Produk Domestik Regional Bruto sebanyak 50 buku dan Kecamatan Dalam Angka sebanyak 210 buku. Dokumen tersebut telah terdistribusi pada seluruh perangkat daerah.
- 3. Meningkatkan Pelayanan Keamanan Informasi**, dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus keamanan informasi dan persandian.

Bahwa kasus keamanan informasi dan persandian tidak dapat diprediksi, namun pada tahun 2021 terdapat 3 kasus keamanan informasi pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Satpol PP dan kebakaran serta Dinas Sosial P3A. OPD tersebut termonitor terdapat kerentanan website belum sampai pada defacement. Dengan adanya CSIRT Trenggalek kasus gangguan keamanan informasi semakin berkurang dan membaik.
- 4. Meningkatkan kualitas layanan E Government** dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2021 capaian kinerja Indeks SPBE sebesar 75,76% yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian KemenPANRB pada tanggal 29 Desember 2021 capaian indeks SPBE Kabupaten Trenggalek **2,58** dengan predikat **cukup**. Hal ini disebabkan bahwa tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Kekurangan data dukung yang belum dimiliki Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah domain manajemen meliputi Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK dengan bobot nilai 16,5% sehingga sangat mempengaruhi indeks SPBE Kabupaten Trenggalek.

Untuk mencapai indeks SPBE dan mewujudkan **Smart City** tidak hanya dicukupi pada satu urusan pemerintahan namun merupakan kolaborasi semua urusan pemerintahan yang diampu perangkat daerah. Program dan kegiatan Diskominfo secara otomatis diarahkan untuk mendukung peningkatan indeks SPBE dan smart city melalui capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Terealisasinya pengembangan CCTV kota 1 paket CCTV kota (7 unit) dengan rincian 2 (dua) terpasang pada pertigaan RPPL, SMPN 3 dan 4 direncanakan dipasang pada Pasar Pon, Tugu Brawijaya, Pertigaan Setda dan Pasar Subuh.
2. Terealisasinya perencanaan infrastruktur TIK 1 dokumen
3. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ruang server dan smart center
4. Tersusunnya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2026

- 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,** dengan 2 (dua) indikator belum dapat diuraikan tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti dan Nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat masih dalam proses pelaksanaan pemeriksaan/penilaian sehingga belum dapat diketahui tingkat capaian kerjanya. Namun hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2020 mendapat nilai 80,17 dengan kategori A.

Tabel 2.2.1
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 dan 2021

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	KETERANGAN
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Nilai (kategori nilai) SAKIP	80,17	82,77	
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	2,58	Peringkat indeks Baik

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	KETERANGAN
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	1. Indeks keterbukaan informasi publik	-	100%	
		2. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	-	94,10%	
		3. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	-	2.399	14 Konten, 2.385 advetorial
		4. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	-	90,09	Aduan masuk 343 ditindaklanjuti 309 aduan, Pengaduan yang belum ditindaklanjuti disebabkan masalah yang diadukan bersifat teknis sehingga harus dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan namun terkadang pengaduan sudah ditindaklanjuti tetapi tidak dilaporkan pada Diskominfo sebagai pengelola pengaduan (SP4N LAPOR)
		5. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	-	2 kali	2 kali sosialisasi pemberdayaan KIM se kab Trenggalek dihadiri 35 orang (7 KIM)
4.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai		100%	
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi memadai		100%	
6..	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase layanan insiden TIK	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD (Perangkat Daerah) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Trenggalek Tahun 2021- 2026, permasalahan dan isu – isu strategis yang

dihadapi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika

- a. Belum optimalnya layanan informasi dan komunikasi publik berkualitas yang bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah.
 - Kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang tata kelola informasi dan komunikasi belum memenuhi standar kebutuhan pelayanan;
- b. Pusat data belum memenuhi standar TIER II;
- c. Belum optimalnya pembangunan dan integrasi aplikasi;
- d. Belum tercukupinya perangkat WAF sebagai penunjang dalam IPS (*Intrusion Preventio System*) atau IDS (*Intrusion Detection System*);
- e. Belum tersedianya rencana induk arsitektur SPBE, *Smart City* dan rencana pengembangan jaringan intra pemerintah;
- f. Belum optimalnya layanan pengaduan pemerintah daerah.

2.3.2 Permasalahan pada urusan statistik

- a. Belum tersedianya data sektoral yang dapat dibagipakaikan dan diinteroperabilitaskan untuk pemenuhan data statistik daerah;
- b. Kurangnya infrastruktur statistik daerah untuk mewujudkan Trenggalek Satu Data;
- c. Masih kurangnya kompetensi SDM;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data statistik yang belum maksimal; dan
- e. Pengembangan sistem keamanan website belum optimal.

2.3.3 Permasalahan pada urusan persandian

- a. Kualitas dan kuantitas SDM Persandian belum memadai;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang persandian.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Trenggalek Tahun 2021- 2026, isu – isu strategis yang dihadapi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui:

- a. Keterhubungan jaringan intra pemerintah daerah;
- b. Integrasi Aplikasi layanan publik di Kabupaten Trenggalek;
- c. Meningkatnya keamanan Informasi pada Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE;
- e. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- f. Pembangunan jaringan internal pemda;
- g. Pelaksanaan pemerintahan kolaboratif;

- h. GCIO (Government Chief Information Officer);
- i. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Satu Data Indonesia;
- k. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- l. Standar data, meta data, interoperabilitas data;
- m. Penerapan tanda tangan elektronik; dan
- n. Pembentukan CSIRT (telah dibentuk tahun 2021 kegiatan selanjutnya monitoring dan evaluasi Keamanan Informasi)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Trenggalek. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 12.550.764.204 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.550.764.204				
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.325.764.204				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	persen	879.107.500				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%	persen	173.110.000				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	persen	4.804.726.704				
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	27	Dokumen	10.000.000				
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	10	dokumen	5.000.000				RENJA 2024, RENJA Perubahan 2023, PK Induk 2023, PK Perubahan 2023, Penyusunan RENAKSI 2023, RKA 2024, DPA 2024, RKA Perubahan 2023, DPA Perubahan 2023, PPRG 2023
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	Dokumen	5.000.000				LkjIP 2022 (1 dok), Lap capaian output per triwulan th. 2023 (4 triwulan) , LAPDU (12 bln/dokumen)
X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)	100		4.794.726.704				
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	orang/bulan	4.704.102.704				40 orang ASN/bulan

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dokumen	87.624.000				laporan gaji 12 bln, laporan tunjangan 12 bln, laporan honorarium pengelola keuangan 12 bln)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	497	Dokumen	1.000.000				Verifikasi SPJ GU 125 berkas/dok, SPJ (dok LS 40 berkas),SPP 165 berkas/dok, SPM 165 berkas/dok, Jurnal penyesuan belanja 1 dok, pemenuhan tindaklanjut APIP/BPK (1 dok)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	Laporan	2.000.000				Lap keuangan 1 dok (CALK, LRA, Neraca), Laporan perubahan ikuitas 1 lap, SPJ fungsional penerimaan 12 bln, SPJ fungsional pengeluaran keuangan 12 bln, Rekonsiliasi LRA per semester 2 lap, Prognosis keuangan per semester 2 laporan, Lap DTH 12 bln dan Reakpaitulasi RTH 12 bln
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentasi Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100		5.000.000				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11	Laporan	5.000.000				KIB (Kartu Inventaris Barang) Semesteran dan Tahunan 2 kali, Mutasi Barang Semesteran dan Tahunan 2 kali, BA Rekon BMD 2 kali/laporan; Kebutuhan Barang RKPD 1 kali, RKPD Perubahan 1 kali, Pemeliharaan 2 kali, Perubahan Pemeliharaan 1 kali;

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Dokumen Pengamanan BMD (Sertifikat BMD, Sertifikat Tanah, Pemagaran, Labelisasi); Jumlah laporan penilaian BMD (Appraisal); Laporan keluar masuk barang (Stok Opname), Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMD oleh OPD; Surat keterangan pemakaian Aset BMD, Pinjam Pakai Aset BMD/Sewa.
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)	100		67.127.000				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	15.000.000				PDH khaki 1 paket (57 PNS/Non PNS), pakaian olah raga 1 paket (57 PNS/Non PNS), Pakaian Korpri 1 paket (40 PNS)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	orang	50.000.000				ASN yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi 20 orang
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68	Dokumen	2.127.000				Penjagaan KP 1 dokumen (5 Org) KGB 1 dokumen (15 org), Pensiun 2 dok (2 org), Bezzeting 1 dok, Pengelolaan Dokumen Kepegawaian; ASIK 12 bln, SIDALAYAK 12 bln, SIMPEG 2 dok, E-KINERJA 12 bln; SKP bulanan 12 bln, SKP tahunan 1 dokumen, lap pelaksanaan evaluasi kinerja 12 bln

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)	100		272.000.000				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.000.000				386 buah belanja alat listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	6	paket	40.000.000				bahan komputer 172 buah , perabot kantor (alat kebersihan sabun dll 411 buah, kemucing, cikrak, gayung@10 buah, bendera 2 buah, umbul-umbul 36 buah , gunting rumput 2 buah, baygon spray 10 buah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3	paket	10.000.000				makan dan minuman (air mineral 136 dus dan camilan untuk tamu/pelayanan)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	30.000.000				Cetak amplop bupati 11, dinas 10, setda 10, kwitansi NCR 95 bendel , blanko SPPD 20 bdl , NCR Folio 40 bdl , Map sediaan Dinas 200 bh, Bupati 150 bh, Foto copy 58.000 lbr, banner
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	Paket	60.000.000				Kertas HVS, bolpoint, binder cli1p, isolasi, continous form, map kertas, map snell, isi staples, buku folio, buku ekspedisi, pembatas kertas, kertas buram, box file, ordner, perforator, triagonal clip jml 2.126, Materai 330 lembar

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif tahun 2023			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	10.000.000				Fasilitasi tamu studi tiru dari kab/ kota lain dan tamu dalam rangka koordinasi selama 1 tahun 4 kali
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	100.000.000				SPPD luar daerah dan dalam daerah sebanyak 50 kali, rapat internal 15 kali
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen	2.000.000				Penatausahaan arsip dilaksanakan setiap bulan 12 bulan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan (peren)	100		71.000.000				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2	unit	1.000.000				1 unit meja kursi tamu, 1 unit meja kerja eselon II
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5	unit	45.000.000				Pengadaan printer 1 unit, laptop 1 unit, tangga besi 1 unit, filling kabinet 2 unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	25.000.000				Keramik 60 dus, closet 2 buah, tandon air 500 l, kran air 5 buah, wastafel 1 buah, pipa, bahan bangunan (rehab kamar toilet)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan (persen)	100		539.980.500				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	1.000.000				Pengiriman naskah dinas ke kecamatan, provinsi dan kementerian
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	laporan	91.200.000				Pembayaran berlangganan listrik, telepon selama 1 tahun (12 bulan)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	15.000.000				Jasa servis kendaraan, komputer, printer, AC

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	432.780.500				Pembayaran honorarium tenaga penunjang Diskominfo sejumlah 17 orang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (persen)	100		97.110.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	unit	20.850.000				Kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya (her) 22 unit roda 2 dan 4 unit roda 4 serta pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit, belanja BBM 4.880 liter, minyak pelumas 45 liter
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9	unit	1.000.000				Pemeliharaan meja kerja 4 unit, kursi 4 unit, lemari 1 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	40	unit	48.500.000				Pemeliharaan printer 6 unit, laptop 5 unit, AC 5 unit, komputer 5 unit, scaner 2 unit, suku cadang kendaraan dinas (ban, leker tensioner, busi, selang vacum, filter angin, lampu, filter oli, reteng, dispot, dop stop, dop depan, belt v) 75 buah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	26.760.000				Pemeliharaan gedung induk, taman, tempat parkir dan RPPL/RKPD
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah			2.664.500.000				

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah update informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100		2.664.500.000				
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	dokumen	175.000.000				dokumen desiminasi informasi/promosi hasil pembuatan dan penyajian konten di media IKP (IG, FB, Twitter, Youtube, radio, media luar/dalam ruang) pemerintah daerah yang dilaksanakan
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.314	dokumen	1.917.900.000				dokumen desiminasi informasi hasil penyusunan bahan informasi dan layanan hubungan media (jurnalistik dari hasil liputan, penulisan release, jumpa pers) yang didesiminasi melalui media IKP pemerintah daerah dan media massa
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	dokumen	150.000.000				1 dokumen setiap bulan terdiri dari : pembuatan infografis, monitoring dan penyusunan rekomendasi opini/aspirasi dari media masa dan peliputan lapangan, pengelolaan pengaduan, Pengelolaan KIP dan pelaksanaan Fungsi PPID
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	12	dokumen	125.000.000				1 bulan terdiri dari 1 dokumen : pemetaan pemangku kepentingan, monitoring/ identifikasi isu strategis dan peningkatan literasi informasi bagi

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pemangku kepentingan, menyediakan bahan informasi dan melaksanakan desiminasi bagi media pemangku kepentingan, melaksanakan kompetisi dan pemberian penghargaan, monev media pemangku kepentingan, koordinasi kehumasan
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik Yang Meningkatkan Kapasitasnya	30	orang	50.000.000				melaksanakan workshop/ lokakarya, bimbingan teknis, pelatihan, monev atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan bagi pejabat/pengelola IKP (PPID, kehumasan, kelompok/komunitas dan pemangku kepentingan)
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	unit	246.600.000				PC 2, Laptop 2, kamera 2, switcher 1, video capture 2, printer scan copy 2, printer dotmatrix 1, modem wifi 2, box camera 2, dry cabinet 2, kabel 2 rol
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo			3.434.500.000				
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			369.820.000				
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah fasilitas	100	persen	3.434.500.000				

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.10	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	dokumen	54.500.000				Fasilitasi domain dan sub domain 5 kali, Penambahan kapasitas sub domain 3 OPD, migrasi sub domain dan swasta ke pemda 4 sistem informasi,
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40	unit	3.380.000.000				33 unit pengelolaan jaringan yg tersedia, ada, 7 unit pembangunan jaringan OPD (7 OPD yg blm).
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah terselenggaranya e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	persen	369.820.000				
2.16.03.2.02.11	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9	dokumen	211.820.000				9 Dok, dok penilaian indeks SPBE, 2 SK tim SPBE, manajemen resiko, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, audit TIK, lap sosialisasi/desk
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	3	unit	118.000.000				3 unit aplikasi (e SAKIP, website OPD peternakan, Kesbangpol, Bakeuda)
2 16 03 2.02 07	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5	dokumen	40.000.000				5 dokumen laporan pelaksanaan pengembangan dan SDM (pelatihan)
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	%	155.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023			Keterangan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		Keterangan
			Target Capaian Kinerja		Pagu indikatif tahun 2023		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4	dokumen	155.000.000				
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	dokumen	85.000.000				4 dokumen : Buku Trenggalek Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Selayang Pandang
2 20 02 2.01 02	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5	unit	70.000.000				5 unit (Aplikasi) : SIMRS (RSUD), Simbada (Bakeuda), e-Lapor (Diskominfo), e-Link (Dinkes), Simcan (Bappeda)
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100%	persen	70.000.000				
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang ditangani			70.000.000				
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	laporan	70.000.000				12 laporan : Laporan Bulanan Pelaksanaan Keamanan Informasi

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Trenggalek. Pada Musrenbang tahun 2022 diperoleh data usulan dari desa Nglebo Kecamatan Suruh dan desa Watuagung Kecamatan Dongko yaitu Penguatan Kapasitas Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Publik dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Urut	Pengusul	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Bidang Pembangunan	Keterangan
12	Pemerintah Desa Nglebo	Komunikasi dan Informatika	#MPP Penguatan Kapasitas Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Sistem Teknologi Informasi Desa	Desa Nglebo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rekomendasi : Usulan diterima dan diteruskan ke tahap selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BIDANG SOSBUDPEM/PPM	
	PEMERINTAH DESA WATUAGUNG	Komunikasi dan Informatika	MPP Penguatan Kapasitas Sumber Daya Informasi dan Komunikasi Publik	Kurangnya Daya Informasi terkait internet dan di butuhkan di masing - masing lingkungan untuk penunjang perkembangan zaman yang serba internet	RT 013 RW 003 Dusun Ngleban, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	Kabupaten/Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rekomendasi : Usulan diterima dan diteruskan ke tahap selanjutnya Koefisien : 0 0 Anggaran : 0	BIDANG SOSBUDPEM/PPM	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan Tema **“Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”**

Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 didukung dan dilaksanakan melalui 2 (dua) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif, Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital dan Berwawasan Lingkungan

Diskominfo sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2019-2024, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada perwujudan Transformasi Digital Nasional. Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand). Sedangkan kebijakan provinsi Jawa Timur, pembangunan dibidang

komunikasi dan informatika adalah pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Di era keterbukaan informasi diperlukan daya dukung berupa sarana dan prasarana TIK sebagai upaya pemberian pelayanan prima untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek sebagai leading sector bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut melaksanakan prioritas pembangunan daerah yaitu “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Handal serta Berwawasan Lingkungan”. Implementasi prioritas tersebut diwujudkan dalam beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara bertahap mewujudkan infrastruktur TIK memadai sebagai pendukung terwujudnya e government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Trenggalek sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan membantu Bupati Trenggalek dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangannya, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kebijakan dibidang teknologi digital. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Trenggalek dalam menjalankan visi dan misi RPJMD Kabupaten Trenggalek 2021 – 2026 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2021– 2026.

Adapun **Visi** Bupati-Wakil Bupati Trenggalek H. MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH MUHAMMAD NATA NEGARA yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”

Sedangkan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
- 2) Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamaan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar)
- 4) Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima; dan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Meningkatnya tata kelola penunjang urusan pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik;
4. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika;
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi.

Uraian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dan target capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
serta target capaian kinerja tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70
			Indeks SPBE	3,0
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori nilai) SAKIP	A (81)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	menuju informatif (80-96)
			Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD	65%
			Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah	720 informasi
			Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan	96%
			Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi	5 kegiatan
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase infrastruktur digital yang memadai	80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	Persentase layanan insiden TIK	100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek menetapkan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Memperhatikan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang;

- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Trenggalek Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Program dan kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Trenggalek oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;

- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
dan
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Listrik, internet, telpon, koran; dan
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Mebel;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, kegiatan:
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:
- 1) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - 2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 3) Pelayanan Informasi Publik;
 - 4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
 - 5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 - 6) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Aplikasi Informatika, meliputi kegiatan
- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; dan
 - 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:
- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral; dan
- 2) Pengembangan Infrastruktur.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan **“Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”**. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran sebesar Rp. 12.550.764.204, - diampu oleh 3 (tiga) urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Anggaran tersebut dijabarkan pada 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga terdapat pendapatan asli daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari pendapatan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)/Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.325.764.204		13.949.012.650					
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	5.856.944.204			100 %	6.019.012.650		
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %			
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %				100 %			
2	16	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	27 Dokumen	10.000.000			27 Dokumen	15.000.000		
2	16	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dokumen	7.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Laporan	7.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	4.794.726.704			100 %	4.823.842.650		
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.704.102.704	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang/bulan	4.724.842.650	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	87.624.000	Kab. Trenggalek,	PENDAPATAN ASLI	36 Dokumen	90.000.000	DINAS KOMUNIKASI

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
								Trenggalek, Ngantru	DAERAH (PAD)			DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	497 Dokumen	1.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	497 Dokumen	2.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	2.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54 Laporan	7.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	5.000.000			100 %	5.000.000	
2	16	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	5.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Laporan	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	67.127.000			100 %	60.000.000	
2	16	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68 Dokumen	2.127.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	68 Dokumen	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	65.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	272.000.000			100 %	362.982.000	
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Paket	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	60.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	10.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	100.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Laporan	158.982.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	4.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	71.000.000			100 %	77.500.000	
2	16	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	7.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	25.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	539.980.500			100 %	565.550.000	
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.200.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	91.200.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432.780.500	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	454.350.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	97.110.000			100 %	109.138.000	
2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	20.850.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	26 Unit	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit	1.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	48.500.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Unit	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	26.760.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	39.138.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	2.664.500.000			100 %	2.950.000.000	
2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	2.664.500.000			100 %	2.950.000.000	
2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	175.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1314 Dokumen	1.917.900.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1314 Dokumen	2.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	150.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	125.000.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	50.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	246.600.000	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	Dana Transfer Umum-Dana	20 Unit	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Alokasi Umum			
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	3.804.320.000			100 %	4.980.000.000	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100 %				100 %		
2 16 03 2,01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3.434.500.000			100 %	4.585.000.000	
2 16 03 2,01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	54.500.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	85.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2,01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	3.380.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Unit	4.500.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2,02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	369.820.000			100 %	395.000.000	
2 16 03 2,02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9 Dokumen	211.820.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 Dokumen	160.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2,02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	118.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	3 Unit	175.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
								Semua Kelurahan	Alokasi Umum				
2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5 Dokumen	40.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			155.000.000				302.000.000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	155.000.000			100 %	302.000.000	
2	20	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	155.000.000			4 Dokumen	302.000.000	
2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	85.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	137.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 Unit	70.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			70.000.000				91.000.000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	70.000.000			100 %	91.000.000	
2	21	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang di Tangani	3 Kasus	70.000.000			3 Kasus	91.000.000	

**Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	70.000.000	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	91.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL								12.550.764.204				14.342.012.650	

BAB V

P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Diskominfo Kabupaten Trenggalek disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 yaitu ” **Transformasi Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim melalui SDM Inovatif, Kolaboratif Serta Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan**” didukung beberapa prioritas pembangunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung prioritas pembangunan ke-1 yaitu **“Meningkatkan SDM Unggul, Inovatif dan Kolaboratif Mendukung Kemandirian Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”** serta tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 harus selaras dan konsisten dengan tujuan dan sasaran Diskominfo Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yaitu:

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatikan Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih , efektif, efisien, produktif dan profesional, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, target kinerja tujuan pada tahun 2023 ditetapkan 70 Nilai RB.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif demi pembangunan yang efektif dan efisien dalam menunjang pelayanan publik yang prima, dengan indikator Indeks SPBE, target kinerja tujuan yang ditetapkan pada tahun 2023 ditetapkan 3,0 Indeks SPBE.

Sedangkan sasaran Renstra Diskominfo tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator
 - a. Nilai (kategori nilai) SAKIP, target kinerja sasaran yang ingin dicapai 2023 ditetapkan A (81);
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target kinerja sasaran yang ingin dicapai 2023 ditetapkan 83.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, dengan indikator meliputi:
 - a. Indeks keterbukaan informasi publik, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan menuju informatif (80-96);
 - b. Persentase OPD yang melaksanakan updating desiminasi informasi program dan kinerja OPD melalui media sosial OPD, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 65%;
 - c. Jumlah desiminasi informasi program dan kinerja pemerintah daerah, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 720 informasi;

- d. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 96%;
 - e. Jumlah kemitraan dengan pemangku kepentingan sebagai jejaring desiminasi informasi, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 5 kegiatan.
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengembangan Aplikasi Informatika, dengan indikator yaitu Persentase infrastruktur digital yang memadai, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 80% OPD tercover jaringan FO dan internet, 1 server dan storage sistem Informasi TIK
 4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator yaitu Persentase penyediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan Data statistik sektoral dan 5 jenis data sektoral terintegrasi; dan
 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi dengan indikator yaitu Persentase layanan insiden TIK, target kinerja sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 ditetapkan 100% layanan Keamanan Informasi dan Persandian.

Diskominfo melaksanakan Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan total anggaran Rp. 12.550.764.204,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Disamping itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga penghasil pendapatan asli daerah yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari pendapatan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)/Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), tahun 2023 sebesar Rp. 6.250.000.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program, kegiatan sub kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Diskominfo Kabupaten Trenggalek haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN